



# *Renja*

*(Rencana Kerja)*

**DINAS KETENAGAKERJAAN  
KOTA TANGERANG  
TAHUN 2024**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.

Renja Disnaker Kota Tangerang Tahun 2024 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025, RPD Kota Tangerang Tahun 2024-2026, Renstra Disnaker Kota Tangerang Tahun 2024-2026 dan Rancangan Awal RKPD Kota Tangerang Tahun 2024.

Renja Disnaker ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi tujuan dan sasaran Rencana Strategis Disnaker Tahun 2024-2026 serta program dan kegiatan Disnaker Tahun 2024. Selanjutnya program dan kegiatan merupakan kebutuhan kinerja yang akan dilaksanakan Disnaker berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan.

Semoga Renja yang telah diselesaikan ini dapat dijadikan pedoman bagi pegawai Disnaker dalam memenuhi target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, agar mampu memberikan kontribusi positif bagi kinerja Pemerintah Kota Tangerang.

Tangerang, Agustus 2023

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN**

**UJANG HENDRA GUNAWAN, S.Sos, MM**  
**NIP. 19720502 200212 1009**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
<b>BAB 2. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	<b>8</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD	27
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
<b>BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>45</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	45
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Disnaker	47
3.3. Program dan Kegiatan	55
<b>BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>57</b>
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	57
<b>BAB 5. PENUTUP</b>	<b>70</b>

## **DAFTAR TABEL**

### **BAB 2**

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah (Renstra Tahun 2019-2023) s.d.Tahun 2022	10
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
Tabel 2.3.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Tangerang	34

### **BAB 3**

Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Dinas Ketenagakerjaan	48
------------	--	----

### **BAB 4**

Tabel 4.1.	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023	58
------------	--	----

## **DAFTAR GAMBAR**

**BAB 2**

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang

17

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Disnaker Kota Tangerang Tahun 2024 nantinya merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Strategis Disnaker Tahun 2024-2026. Renja SKPD disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renja secara teknis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Disnaker disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan.

Renja Disnaker memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Disnaker disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyiapan penyusunan Renja SKPD, meliputi pembentukan tim penyusun Renja

SKPD, orientasi Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi;

2. Penyusunan Rancangan Renja SKPD, mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD;
3. Pelaksanaan Forum SKPD, merupakan pembahasan rancangan Renja SKPD antara pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan;
4. Penetapan Renja SKPD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Disnaker Tahun 2024, dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renja, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua



- Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 6);
  18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012-2032;
  19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025;
  20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8);
  21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3);
  22. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 133 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun

yang merupakan penjabaran dari Renstra dan mengacu kepada RPKD. Oleh karena itu penyusunan Renja Disnaker dimaksudkan untuk memberi pedoman, arahan dan acuan bagi Disnaker dalam urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan pada tahun 2024 sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Disnaker adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan prioritas pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan pada tahun 2024;
2. Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Disnaker Kota Tangerang Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut :

#### **BAB 1. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RPKD, Renstra SKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

##### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB 2. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan.

## **BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

### **3.3. Program dan Kegiatan**

## **BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

**BAB 5. PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN LALU**

## **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD tahun berjalan yang baru disahkan.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang direncanakan.

Review capaian prioritas dan target program Renstra SKPD dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program.
2. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra SKPD.
3. Rumuskan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan

capaian kinerja program Renstra SKPD dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

4. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan, misalnya program apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan daripelaksanaannya.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2023 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

**Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra  
Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d akhir Renstra (2023)	R ealisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2019	R ealisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2020	R ealisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	R ealisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Ti ngkat Realisasi (%)		R ealisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023	Ti ngkat Capaian Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023	R ealisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Ti ngkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 =(9/8)	11	12	13 =(12/11)	14 =(5+6 +7+9+ 12)	15 =(14/4 )
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
7	2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat Ketersediaan Perencanaan Tenaga Kerja	10 0%		10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	50 %	50 %	83 ,33%	83 ,33%
7	2	01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen	2	2	2	10 0%	2	1	50 %	83 ,33%	83 ,33%

**Rencana Kerja  
Disnaker Tahun 2024**

					Perencanaan Tenaga Kerja													
7	3				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase tenaga kerja terlatih yang bersertifikat kompetensi	51,35%	65,29%	20%	51,43%	50,00%	88,26%	176,53%	51,35%	33,04%	64,34%	51,60%	100,49%
7	3	.01	2		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih	1570	360	100	350	380	343	90,26%	405	112	27,65%	1265	80,57%
												90,26%					1265	
7	3	.02	2		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang memiliki perizinan	80	71	79	80	80	42	53%	80	57	71,25%	57	71,25%
							60			12	12	12	100				51	
7	3	.05	2		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Yang Bersertifikasi	644	74	20	180	180	178	99%	320	-	0%	452	70,19%
							644			180							452	
7	4				Program Penempatan Tenaga Kerja	Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan	81,88%	78,13%	80,00%	85,92%	80,94%	98,89%	122,18%	81,88%	90,06%	109,99%	86,6%	105,76%
7	4	.01	2		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	61869	12076	12393	12192	12500	12755	102,04%	12700	1668	13,13%	51084	82,57%





**Rencana Kerja  
Disnaker Tahun 2024**

			30	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Monitoring Perusahaan												
			02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	57 9	10 0	19 4	11 3	95	95	10 0%	95	16	16 ,84%	51 8	89 ,46%
			10	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Mekanisme Teknik Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial												
					Jumlah Pelaksanaan Kegiatan May Day												
			20	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial												
			40	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Depeko dan LKS Tripartit												
2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN		10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	25 %	25 %	85 %	85 %







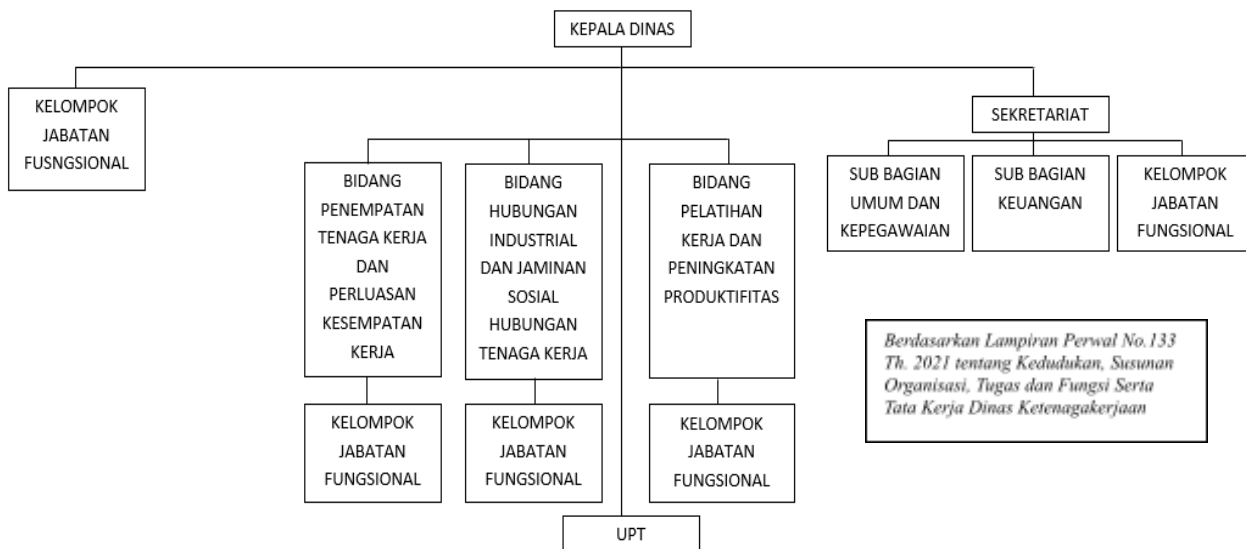


## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang. Susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang berdasarkan Pasal 2 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, yang membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja,
- d. Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
- e. Bidang Pelatihan kerja dan Peningkatan Produktivitas,
- f. UPT, dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1

### Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3, Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang ketenagakerjaan;
- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang ketenagakerjaan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenagakerjaan;
- Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang ketenagakerjaan;
- Pengelolaan UPT; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dari masing-masing satuan organisasi (unit kerja) pada Dinas Ketenagakerjaan sebagai berikut :



## **A. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penatausahaan urusan umum;
- b. penatausahaan urusan kepegawaian;
- c. penatausahaan urusan keuangan;
- d. pengkoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas;
- e. pengkoordinasian dalam pembangunan dan pengembangan *e-government*; dan
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang-Bidang dan UPT-UPT di lingkungan Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Susunan organisasi sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub-Bagian Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan kepegawaian. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah Dinas;
- c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Dinas;

- h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
- i. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dalam penguasaan Perangkat Daerah;
- j. melakukan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan e-government;
- k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah:

- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Dinas;
- c. melakukan penatausahaan anggaran Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- g. melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## **B. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja**

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Untuk

menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja;
- b. penyelenggaraan pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- c. penyelenggaraan koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja;
- d. penyelenggaraan verifikasi penerbitan izin kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
- e. penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- f. penyelenggaraan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- g. pengoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon TKI;
- h. penyelenggaraan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- i. penyelenggaraan pembinaan keberadaan tenaga kerja asing di Daerah;
- j. pengoordinasian penyelenggaraan Tenaga Kerja Luar Negeri pra dan purna penempatan;
- k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Susunan organisasi Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### **C. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja;
- b. penyelenggaraan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan, fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit;
- c. penyelenggaraan upaya-upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- d. penyelenggaraan pengusulan rancangan penetapan Upah Minimum Kota dan sektoral ;
- e. penyelenggaraan pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
- f. penyelenggaraan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- g. penyelenggaraan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi/mediasi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan syarat-syarat kerja; dan
- h. melakukan pendaftaran alur proses, pendaftaran pemborongan pekerjaan, pendaftaran penyedia jasa pekerja/buruh
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Susunan organisasi Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **D. Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas**

Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup Pelatihan kerja dan Peningkatan Produktivitas. Bidang Pelatihan kerja dan Peningkatan Produktivitas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK);
- b. penyelenggaraan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta
- c. penyelenggaraan koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;

- d. penyelenggaraan koordinasi pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- e. penyelenggaraan koordinasi/pemberian tanda daftar Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan di perusahaan;
- f. penyelenggaraan koordinasi / pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- g. penyelenggaraan koordinasi pengukuran dan analisis produktivitas tingkat kota;
- h. penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri terhadap lembaga pelatihan kerja;
- i. penyelenggaraan koordinasi pemantauan tingkat produktifitas;
- j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Susunan organisasi Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **E. Kelompok Jabatan Fungsional**

Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional, sebagai berikut :

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- 4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang

mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Jabatan fungsional dan Sub-Koordinator, sebagai berikut :

- 1) Pejabat fungsional yang menjadi Koordinator dan/atau Sub-koordinator merupakan jabatan fungsional hasil penyetaraan atau bukan hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.
- 2) Koordinator dan/atau Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- 3) Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator dan/atau Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota.

Analisis kinerja SKPD disajikan dalam Tabel 2.2 di bawah ini :

**Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	I KK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Daerah				Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			7,13	8,63	8,24	7,87	7,54	7,13	8,63	9,04	7,16	6,90	6,64	
	Jumlah Lowongan Kerja			2280 4	1676 7	1680 0	1780 0	1800 0	2280 4	1676 7	2262 8	2273 7	18000	20000	
	Prosentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan			80,6 0	80,0 0	80,0 0	80,9 4	81,8 8	80,6 0	80,0 0	85,9 2	98,8 9	81,88	82,00	
	Tingkat Ketersediaan Perencanaan Tenaga Kerja		√	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	100	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja			0	0	2	2	2	0	0	2	2	2	2	
	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kerja Makro			0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	
	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kerja Mikro			0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	
	Prosentase Tenaga Kerja Terlatih Yang Bersertifikat Kompetensi		√	65,2 9	20,0 0	47,3 5	50,0 0	51,3 5	65,2 9	20,0 0	51,4 3	88,2 6	51,35	75,00	
	Jumlah Pencari Kerja Yang Dilatih			360	100	380	360	370	360	100	360	343	370	380	

**Rencana Kerja  
Disnaker Tahun 2024**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	I KK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Daerah				Proyeksi		Catatan Analisis	
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	Jumlah Pencari Kerja Yang Dilatih															
	Jumlah sarana pelatihan kerja yang diadakan			0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1		
	Jumlah LPK Yang Memiliki Perijinan			71	79	80	80	80	71	79	80	80	80			Indikator output berbeda
	Pembinaan LPK yang dilaksanakan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			Indikator output berbeda
	Jumlah Tenaga Kerja Yang Bersertifikasi					180	180	190			180	180	190			Indikator output berbeda
	Penyelenggaraan Uji Kompetensi					180	180	190			180	180	190			Indikator output berbeda
	Prosentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan		√			80	80,94	81,88			85,92	98,89	81,88	98,46		
	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan					12200	12500	12700			12192	12755	12700	12750		
	Jumlah Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja Yang Dilaksanakan					42	42	42			15	30	45			Indikator output berbeda
	Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri/Wirausaha					900	400	480			660	1556	480			
	Jumlah Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Yang Dilaksanakan					12	12	12			12	12	12	12		
	Jumlah Penyelenggaraan Job Fair Online					12	12	12			12	12	12			
	Jumlah Calon Pekerja Migran					30	35	40			40	113	40			



**Rencana Kerja  
Disnaker Tahun 2024**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	I KK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Daerah				Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia Yang Terdata														
	Perlindungan PMI Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kota Tangerang					30	35	40			40	113	40		Indikat or output berbeda
	Prosentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan					62,2	63,7 8	65,3 5			71,7 5	100	65,3 5	70,37	
	Jumlah Perusahaan Yang Memiliki PP/PKB					125	120	120			247	216	120	130	
	Jumlah Bimbingan Teknis Penyusunan PP/PKB					2	2	2			2	2	2		
	Jumlah Monitoring Perusahaan					9	9	9			9	9	9		
	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan					95	95	95			127	95	95		
	Jumlah Kegiatan Mekanisme Teknik Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial					2	2	2			2	2	2		
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan May Day					1	1	1			1	1	1		
	Jumlah Penyelesaian Kasus Perselisihan					95	95	95			127	95	95		

**Rencana Kerja  
Disnaker Tahun 2024**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	I KK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Daerah				Proyeksi		Catatan Analisis	
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	Hubungan Industrial															
	Jumlah Kegiatan Depeko dan LKS Tripartit					12	12	12			12	12	12			

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD**

Berdasarkan analisis kajian hasil evaluasi pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD.

Berdasarkan uraian di atas teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Disnaker dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

1. ***Kualitas dan kompetensi tenaga kerja;*** Daya saing tenaga kerja dipengaruhi oleh kualitas dan kompetensi dari tenaga kerja tersebut. Meskipun lowongan kerja yang tersedia cukup besar, namun apabila faktor kualitas SDM tenaga kerja di Kota Tangerang rendah, maka akan dapat mempengaruhi besar kecilnya kesempatan kerja yang berdampak pada pengangguran di Kota Tangerang. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja di Kota Tangerang mutlak diperlukan agar tenaga kerja Kota Tangerang dapat bersaing dengan tenaga kerja dari wilayah lain, terutama pada era pasar bebas saat ini;
2. ***Kemandirian tenaga kerja;*** Ketergantungan tenaga kerja terhadap lowongan pekerjaan, merupakan salah satu bukti masih belum mandiri tenaga kerja di Kota Tangerang. Akibatnya lowongan kerja yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang berdampak pada peningkatan angka pengangguran. Kemandirian yang dimaksudkan adalah upaya tenaga kerja untuk dapat menciptakan lapangan kerja sendiri, tanpa harus bergantung dari lowongan kerja yang tersedia. Melalui adanya kemandirian, diharapkan akan tercipta lapangan pekerjaan baru yang tidak hanya membawa manfaat bagi tenaga kerja tersebut, namun juga meningkatkan akses dan kesempatan kerja serta pertumbuhan perekonomian Kota Tangerang. Dalam upaya perwujudan kemandirian, tenaga kerja di Kota Tangerang dituntut untuk memiliki kemampuan (*skill*) yang cukup dan kreatif.

3. **Akses dan kesempatan kerja.** Perluasan akses dan kesempatan kerja dibutuhkan untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Tangerang. Peningkatan akses tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dalam menanggulangi angka pengangguran. Perlu adanya inovasi baru dalam pelayanan kartu pencari kerja(AK-I) dalam bentuk *online*
4. **Perlindungan hukum bagi tenaga kerja;** Lemahnya peraturan hukum yang mengatur mengenai norma-norma ketenagakerjaan merupakan ancaman dalam upaya menjaga keharmonisan iklim pekerjaan. Lemahnya peraturan tersebut merupakan bukti belum terlindunginya hak-hak tenaga kerja di Kota Tangerang. Kondisi tersebut dapat menciptakan konflik yang akan merugikan tenaga kerja.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka dirumuskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, yaitu:

A. Peningkatan Kesempatan Kerja

Peningkatan kesempatan kerja akan dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Meningkatkan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam menyerap lulusan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan.
- b. Menyelenggarakan kegiatan bursa kerja (job fair) baik secara virtual maupun secara langsung dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada perusahaan untuk mengikuti kegiatan tersebut.
- c. Mendorong perusahaan dalam kegiatan pemagangan, sehingga mampu menyerap tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu yang akan berdampak pada pengurangan jumlah pengangguran.
- d. Mendorong perusahaan agar melakukan pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sehingga didapatkan data kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- e. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Luar Negeri (LPKLN) dan Bursa Kerja Khusus (BKK) baik SMK maupun Perguruan Tinggi dalam rangka menyampaikan informasi peluang kerja di luar negeri dan mempersiapkan tenaga kerja dengan pelatihan Bahasa asing.

**B. Peningkatan Kompetensi Dan Daya Saing Tenaga Kerja**

Peningkatan kompetensi adalah kombinasi dari keterampilan, perilaku, sikap, dan pengetahuan yang ditunjukkan oleh seorang tenaga kerja dan calon tenaga kerja dengan baik. Tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang tinggi adalah salah satu sumber daya terpenting yang dapat dimiliki setiap perusahaan karena, mereka dapat berkontribusi secara langsung dalam meningkatkan daya unggul perusahaan di dalam industrinya. Sedangkan calon tenaga kerja dengan kompetensi yang baik akan mendapat peluang kerja yang baik. Peningkatan Kompetensi Dan Daya Saing Tenaga Kerja akan dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Peningkatan akreditasi program pelatihan pada Balai Latihan Kerja (BLK) dan penyesuaian program pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry.
- b. Peningkatan pembinaan dan Kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta dan LPK Perusahaan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
- c. Pelatihan berbasis kewirausahaan dalam rangka membentuk dan meningkatkan jumlah wirausaha baru yang berdampak pada penurunan angka pengangguran.
- d. Pembinaan Bursa Kerja Khusus baik di SKM maupun di Perguruan Tinggi melalui program Pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry.

**C. Perlindungan Tenaga Kerja**

Perlindungan terhadap tenaga dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Berikut prinsip-prinsip perlindungan tenaga kerja dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja di antaranya :

- a. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;

- b. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan;
- c. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha;
- d. Setiap mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat kemampuannya melalui pelatihan kerja;
- e. Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri;
- g. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama;
- h. Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- i. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja;
- j. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 88 ayat (1) UU No. 13/2003 menyatakan dengan tegas dan jelas, “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”. Hak-hak tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut sebagai berikut :

- a. Hak – Hak Karyawan
- b. Hak Memperoleh Upah.
- c. Hak Mendapatkan Kesempatan & Perlakuan yang Sama.
- d. Hak Mendapatkan Pelatihan Kerja.
- e. Hak Penempatan Tenaga Kerja.
- f. Hak Memiliki Waktu Kerja yang Manusiawi.
- g. Hak Mendapatkan Kesehatan & Keselamatan Kerja.
- h. Hak Mendapatkan Kesejahteraan.
- i. Hak Ikut Serta Dalam Serikat Pekerja/Buruh

Pada periode pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024-2026, perlindungan hak pekerja akan dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Usulan penetapan upah minimum kota (UMK) sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku serta penerapan perlindungan tenaga kerja melalui monitoring kepatuhan pelaksanaan pemberian UMK dan jaminan kesehatan serta jaminan social ketenagakerjaan.
- b. Pemberian perlindungan tenaga kerja di luar negeri bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Kota Tangerang melalui kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (BP2MI).

#### D. Hubungan Industrial

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hubungan industrial adalah hubungan pihak yang berkepentingan atas proses produksi baik barang maupun jasa di perusahaan. Hubungan industrial mengambil istilah dari "labour relation" atau hubungan perburuhan.

Pada periode pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024-2026, hubungan industrial akan dilaksanakan melalui sarana hubungan industrial yang terdiri dari :

- a. Pembinaan kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Pengusaha;
- c. Meningkatkan pembinaan kepada Lembaga Kerjasama Bipartit;
- d. Kerjasama dengan Lembaga Kerjasama Tripartit;
- e. Sosialisasi dan pengesahan Peraturan Perusahaan;
- f. Sosialisasi dan pengesahan Perjanjian Kerja Bersama;
- g. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan;
- h. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan

kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam RKPD;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Disajikan dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama untuk memudahkan analisis;
4. Melakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam RKPD;
5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai, dilakukan langkah berikut:
  - a. Pengecekan apakah indikator kinerjanya sesuai, jika tidak sesuai, ditentukan indikator yang akan dipilih;
  - b. Meneliti besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, bila terdapat perbedaan, maka dikaji kembali besaran tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif, target capaian Renstra SKPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya; dan
  - c. Memberi catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.
7. Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda), dilakukan langkah berikut:



- a. Untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam RKPD, maupun yang hanya terdapat dalam identifikasi kebutuhan hasil analisis, dilakukan pengecekan apakah masih layak untuk direncanakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran target Renstra SKPD, kebijakan nasional, pencapaian visi-misi kepala daerah, dan ketersediaan pendanaan;
  - b. Meneliti kembali kemudian tentukan indikator yang akan dipilih;
  - c. Meneliti kembali kemudian tentukan besaran tolok ukur atau target capaian program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif berdasarkan arahan rancangan awal RKPD, target capaian Renstra SKPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya;
  - d. Memberi catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.
8. Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan
  9. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Tangerang

SKPD : Dinas Ketenagakerjaan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					26.805.708.977,60					26.805.708.977,60	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tangerang	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	20.405.190.124	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tangerang	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	20.405.190.124	
			Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%				Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		
			Tingkat Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%				Tingkat Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%		
			Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%				Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		
			Tingkat Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%				Tingkat Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		

**Rencana Kerja  
Disnaker Tahun 2024**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%				Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		
			Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	100%				Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	100%		
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tangerang	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tangerang	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	500.000	
1.1.1.	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>9 Dokumen</i>	<i>500.000</i>	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>9 Dokumen</i>	<i>500.000</i>	
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tangerang	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14.019.737.323	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tangerang	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14.019.737.323	
1.2.1.	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>40 Orang/Bulan</i>	<i>14.019.737.323</i>	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>40 Orang/Bulan</i>	<i>14.019.737.323</i>	
1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Tangerang	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	6 Dokumen	500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Tangerang	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	6 Dokumen	500.000	
1.3.1.	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>500.000</i>	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>500.000</i>	
1.4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tangerang	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	4 jenis	12.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tangerang	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	4 jenis	12.000.000	

**Rencana Kerja  
Disnaker Tahun 2024**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.4.1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tangerang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	40 paket	12.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tangerang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	40 paket	12.000.000	
1.4.2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Tangerang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Tangerang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	-	
1.431.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tangerang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tangerang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	-	
1.4.4.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tangerang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tangerang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	-	
1.5.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Tangerang</b>	<b>Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia</b>	<b>7 jenis</b>	<b>1.889.691.350</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Tangerang</b>	<b>Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia</b>	<b>7 jenis</b>	<b>1.889.691.350</b>	
1.5.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Tangerang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	13.523.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Tangerang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	13.523.000	
1.5.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tangerang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	148.970.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tangerang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	148.970.100	
1.5.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Tangerang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	40.853.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Tangerang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	40.853.600	
1.5.4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Tangerang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	943.984.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Tangerang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	943.984.000	
1.5.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tangerang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	33.175.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tangerang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	33.175.000	

**Rencana Kerja  
Disnaker Tahun 2024**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.5.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Tangerang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	1.821.600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Tangerang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	1.821.600	
1.5.7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tangerang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	675.197.450	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tangerang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	675.197.450	
1.6.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>Kota Tangerang</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana aparatur daerah yang memadai</b>	<b>5 jenis</b>	<b>20.166.600</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>Kota Tangerang</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana aparatur daerah yang memadai</b>	<b>5 jenis</b>	<b>20.166.600</b>	
1.6.3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tangerang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	20.166.600	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tangerang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	20.166.600	
1.7.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Tangerang</b>	<b>Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia</b>	<b>3 jenis</b>	<b>3.780.475.601</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Tangerang</b>	<b>Tercapainya target dan peningkatan kinerja melalui Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.780.475.601</b>	
1.7.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tangerang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	5.493.400.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tangerang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	5.493.400.00	
1.72..	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tangerang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	769.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tangerang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	769.000.000	
1.7.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tangerang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3.005.982.201	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tangerang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3.005.982.201	
1.8.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Tangerang</b>	<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia</b>	<b>6 jenis</b>	<b>914.285.850</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Tangerang</b>	<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia</b>	<b>6 jenis</b>	<b>914.285.850</b>	

**Rencana Kerja  
Disnaker Tahun 2024**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.8.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tangerang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 unit	264.806.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tangerang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 unit	264.806.000	
1.8.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Tangerang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	239.687.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Tangerang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	239.687.100	
1.8.3.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Tangerang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	184 unit	51.027.500	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Tangerang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	184 unit	51.027.500	
1.8.4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tangerang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	158.765.250	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tangerang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	158.765.250	
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Kota Tangerang</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Perencanaan Tenaga Kerja</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>150.428.460,00</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Kota Tangerang</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Perencanaan Tenaga Kerja</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>156.686.283,94</b>	
2.1.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Tangerang	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2 jenis	150.428.460,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Tangerang	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2 jenis	156.686.283,94	
2.1.1.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Tangerang	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	98.343.000,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Tangerang	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	98.343.000,00	
2.1.2.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Tangerang	Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro	8 perusahaan	52.085.460,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Tangerang	Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro	8 perusahaan	58.343.283,94	

**Rencana Kerja  
Disnaker Tahun 2024**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Kota Tangerang	<b>Prosentase Tenaga Kerja Terlatih Yang Bersertifikat Kompetensi</b>	75,00 %	3.190.965.637,60	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Kota Tangerang	<b>Prosentase Tenaga Kerja Terlatih Yang Bersertifikat Kompetensi</b>	75,00 %	3.323.709.808,12	
3.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Tangerang	Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	3 jenis	2.683.704.837,60	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Tangerang	Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	3 jenis	2.816.449.008,12	
3.1.1.	<i>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berdasarkan Klaster Kompetensi</i>	Kota Tangerang	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>	<i>380 orang</i>	2.255.579.837,60	<i>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berdasarkan Klaster Kompetensi</i>	Kota Tangerang	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>	<i>380 orang</i>	2.388.324.008,12	
3.1.2.	<i>Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja</i>	Kota Tangerang	<i>Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun</i>	<i>30 lembaga</i>	28.125.000	<i>Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja</i>	Kota Tangerang	<i>Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun</i>	<i>30 lembaga</i>	28.125.000	
3.1.3.	<i>Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota</i>	Kota Tangerang	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja</i>	<i>32 unit</i>	400.000.000	<i>Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota</i>	Kota Tangerang	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja</i>	<i>32 unit</i>	400.000.000	
3.2.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Tangerang	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12 bulan	184.379.500,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Tangerang	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12 bulan	184.379.500,00	
3.2.1.	<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	Kota Tangerang	<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</i>	<i>5 lembaga</i>	184.379.500,00	<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	Kota Tangerang	<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</i>	<i>5 lembaga</i>	184.379.500,00	
3.3.	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Tangerang	Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	1 kegiatan	18.852.100	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Tangerang	Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	1 kegiatan	18.852.100	

**Rencana Kerja  
Disnaker Tahun 2024**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
3.3.1.	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kota Tangerang	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 perizinan	18.852.100	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kota Tangerang	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 perizinan	18.852.100	
3.4.	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Tangerang	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	1 kegiatan	103.877.347	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Tangerang	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	1 kegiatan	103.877.347	
3.4.1.	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Tangerang	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	100 perusahaan	103.877.347	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Tangerang	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	100 perusahaan	103.877.347	
3.5.	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	246.961.300	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	246.961.300	
3.5.1.	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Tangerang	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	280 Dokumen	246.961.300	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Tangerang	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	280 Dokumen	246.961.300	
<b>4.</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Kota Tangerang</b>	<b>Prosentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan</b>	<b>98,84%</b>	<b>1.974.218.700</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Kota Tangerang</b>	<b>Prosentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan</b>	<b>98,84%</b>	<b>1.974.218.700</b>	
4.1.	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2 jenis	1.039.536.500,00	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2 jenis	1.039.536.500,00	
4.1.1.	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Kota Tangerang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	6750 orang	337.657.700,00	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Kota Tangerang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	6750 orang	337.657.700,00	



**Rencana Kerja  
Disnaker Tahun 2024**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.1.2.	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Tangerang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	840 orang	701.878.800	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Tangerang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	840 orang	701.878.800	
4.2.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Tangerang	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	12 Kegiatan	724.146.400	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Tangerang	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	12 Kegiatan	724.146.400	
4.2.1.	Job Fair/ Bursa Kerja.	Kota Tangerang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	5000 orang	724.146.400	Job Fair/ Bursa Kerja.	Kota Tangerang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	5000 orang	724.146.400	
4.3.	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	12 kegiatan	210.535.800	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	12 kegiatan	210.535.800	
4.3.1.	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indomesia (PMI)	Kota Tangerang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	170 orang	210.535.800	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indomesia (PMI)	Kota Tangerang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	170 orang	210.535.800	
5.	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Kota Tangerang</b>	<b>Prosentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan</b>	<b>69,23%</b>	<b>1.084.906.056</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Kota Tangerang</b>	<b>Prosentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan</b>	<b>69,23%</b>	<b>1.084.906.056</b>	
5.1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Pelaksanaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 kegiatan	199.553.656	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Pelaksanaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 kegiatan	199.553.656	

**Rencana Kerja  
Disnaker Tahun 2024**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.1.1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Tangerang	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	130 perusahaan	111.803.656	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Tangerang	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	130 perusahaan	111.803.656	
5.1.2.	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Kota Tangerang	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	25 perusahaan	43.200.000	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Kota Tangerang	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	25 perusahaan	43.200.000	
5.1.3.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Tangerang	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	9 laporan	44.550.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Tangerang	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	9 laporan	44.550.000	
5.2.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	5 kegiatan	885.352.400	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	5 kegiatan	885.352.400	
5.2.1.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	95 perkara	297.128.400	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	95 perkara	297.128.400	

**Rencana Kerja  
Disnaker Tahun 2024**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
5.2.2.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	95 perkara	22.820.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	95 perkara	22.820.000	
5.2.3.	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Tangerang	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	41.892.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Tangerang	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	41.892.000	
5.2.4.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga	434.532.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga	434.532.000	
5.2.5.	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Tangerang	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	60 orang	88.980.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Tangerang	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	60 orang	88.980.000	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan**

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musrenbang (forum musyawarah perencanaan tahunan) baik tingkat kecamatan maupun tingkat kota yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Disnaker telah diakomodir dalam program dan kegiatan Disnaker yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Disnaker sebagai SKPD memiliki kewajiban untuk mewujudkan akuntabilitas kinerjanya, dimana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki makna perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik, berdasarkan kebijakan yang telah disepakati maka program perlu ditetapkan dalam upaya pencapaian misi yang telah ditetapkan, program Renja SKPD identik dengan program pada Renstra SKPD.

Dengan tetap memperhatikan kebijakan, program adalah suatu upaya cara bertindak dalam upaya pencapaian misi, selama kurun waktu tertentu secara operasional (tahunan) dilaksanakan melalui kegiatan program. Tujuan program merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan program, setelah program dilaksanakan melalui beberapa kegiatan. Tujuan program akan tercapai apabila sasaran program tercapai artinya bahwa tujuan program akibat dari sasaran program yang merupakan suatu pernyataan yang ingin dicapai pada tingkat program untuk kepentingan sekelompok masyarakat dan atau wilayah dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, terdapat 5 agenda prioritas pembangunan nasional, yaitu :

#### **1. Pembangunan Infrastruktur**

Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan.

#### **2. Pembangunan SDM**

Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi

3. Mendorong Investasi

Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya

4. Reformasi Birokrasi

Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga.

5. Penggunaan APBN

Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam RPJMN, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan nasional untuk mencapai kedaulatan pangan, ketersediaan energi dan pengelolaan sumber daya maritim serta kelautan dalam lima tahun ke depan.

Pemerintah juga berkomitmen mengarahkan pembangunan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, dengan mendorong warga Indonesia memiliki jiwa gotong royong, dan harmonis dalam kehidupan antar kelompok sosial.

Pemerintah juga ingin agar postur perekonomian dapat sesuai dengan pertumbuhan yang berkualitas. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif, berbasis luas, dan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pertumbuhan berkualitas itu dicapai secara bersamaan dengan meraih keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, dan mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Dalam satu tahun pertama, agenda pembangunan bertujuan membangun fondasi untuk akselerasi pembangunan yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

Untuk agenda pembangunan lima tahun ke depan, pemerintah akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi proses pembangunan selanjutnya.

Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

### **3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Disnaker dan memiliki keterkaitan dengan visi Disnaker yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun *tangible*, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang. Adapun tujuan Disnaker adalah "Meningkatkan Kesempatan Kerja".

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1  
Rumusan dan Rencana Program Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				26.805.708.977,60				27.071.970.561,91
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				20.405.190.124,00	APBD			20.405.190.124,00
2	07	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tangerang	16 dokumen	500.000	APBD		16 dokumen	500.000
2	07	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tangerang	9 dokumen	500.000			9 dokumen	500.000
2	07	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tangerang	1 Tahun	14.019.737.323	APBD		1 Tahun	14.019.737.323
2	07	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tangerang	40 Orang/Bulan	14.019.737.323	APBD		40 Orang/Bulan	14.019.737.323
2	07	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
2	07	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
2	07	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	Kota Tangerang	12 Dokumen	12.000.000	APBD		12 Dokumen	12.000.000
2	07	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Kota Tangerang	40 paket	12.000.000	APBD		40 paket	12.000.000
2	07	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Tangerang	100%	1.889.691.350	APBD		100%	1.889.691.350



**Rencana Kerja  
Disnaker Tahun 2024**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Kota Tangerang	1 paket	13.523.000	APBD		1 paket	13.523.000
2	07	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Tangerang	1 paket	159.567.900	APBD		1 paket	159.567.900
2	07	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kota Tangerang	1 paket	41.936.600	APBD		1 paket	41.936.600
2	07	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Tangerang	1 paket	943.984.000	APBD		1 paket	943.984.000
2	07	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tangerang	1 paket	41.102.250	APBD		1 paket	41.102.250
2	07	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang Disediakan	Kota Tangerang	12 dokumen	2.775.600	APBD		12 dokumen	2.775.600
2	07	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tangerang	12 laporan	686.802.000	APBD		12 laporan	686.802.000
2	07	01	207		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana aparatur daerah yang memadai</b>	Kota Tangerang	5 Jenis	-	APBD		5 Jenis	-
2	07	01	207	01	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	Kota Tangerang	<i>unit</i>	-	APBD		<i>unit</i>	-
2	07	01	207	02	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	Kota Tangerang	<i>unit</i>	-	APBD		<i>unit</i>	-
2	07	01	207	06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Kota Tangerang	<i>unit</i>	-	APBD		<i>unit</i>	-

**Rencana Kerja  
Disnaker Tahun 2024**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Tangerang	unit	-	APBD		unit	-
2	07	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Tangerang	unit	-	APBD		unit	-
2	07	01	208		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia</b>	<b>Kota Tangerang</b>	<b>3 jenis</b>	<b>-</b>	<b>APBD</b>		<b>3 jenis</b>	<b>-</b>
2	07	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia	Kota Tangerang	12 laporan	5.493.400.00	APBD		12 laporan	5.493.400.00
2	07	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Kota Tangerang	12 laporan	769.000.000	APBD		12 laporan	769.000.000
2	07	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	Kota Tangerang	12 laporan	3.005.982.201	APBD		12 laporan	3.005.982.201
2	07	01	209		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia</b>		<b>100%</b>	<b>652.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>652.000.000</b>
2	07	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Tangerang	19 unit	264.806.000	<b>APBD</b>		19 unit	264.806.000
2	07	01	208	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Tangerang	11 unit	239.687.100	APBD		11 unit	239.687.100
2	07	01	208	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Tangerang	184 unit	52.027.500	APBD		184 unit	52.027.500
2	07	01	208	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Tangerang	5 unit	158.765.250	APBD		5 unit	158.765.250

**Rencana Kerja  
Disnaker Tahun 2024**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	01	208	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Tangerang	5 unit	-	APBD		5 unit	-
2	07	01	208	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Tangerang	5 unit	-	APBD		5 unit	-
2	07	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Perencanaan Tenaga Kerja</b>	<b>Kota Tangerang</b>	<b>100%</b>	<b>150.428.460,00</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>156.686.283,94</b>
2	07	02	201		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Kota Tangerang	2 dokumen	71.820.000	APBD		2 dokumen	71.820.000
2	07	02	201	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Tangerang	1 dokumen	98.343.000,00	APBD		1 dokumen	98.343.000,00
2	07	02	201	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro	Kota Tangerang	8 perusahaan	52.085.460,00	APBD		12 perusahaan	58.343.283,94
2	07	03			<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Prosentase Tenaga Kerja Terlatih Yang Bersertifikat Kompetensi</b>	<b>Kota Tangerang</b>	<b>75%</b>	<b>3.190.965.637,60</b>	<b>APBD</b>		<b>82,14%</b>	<b>3.323.709.808,12</b>
2	07	03	201		<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Kota Tangerang</b>	<b>3 jenis</b>	<b>2.636.895.390,60</b>	<b>APBD</b>		<b>3 jenis</b>	<b>2.769.639.561,12</b>
2	07	03	201	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kota Tangerang	380 orang	2.208.770.390,60	APBD		380 orang	2.341.514.561,12
2	07	03	201	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun	Kota Tangerang	30 lembaga	28.125.000	APBD		30 lembaga	28.125.000
2	07	03	201	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kota Tangerang	32 unit	400.000.000	APBD		32 unit	400.000.000

**Rencana Kerja  
Disnaker Tahun 2024**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	03	202		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Tangerang	1 jenis	184.379.500,00	APBD		1 jenis	184.379.500,00
2	07	03	202	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kota Tangerang	5 lembaga	184.379.500,00	APBD		5 lembaga	184.379.500,00
2	07	03	203		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Tangerang	1 kegiatan	18.852.100	APBD		1 kegiatan	18.852.100
2	07	03	203	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kota Tangerang	5 perizinan	18.852.100	APBD		5 perizinan	18.852.100
2	07	03	204		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Tangerang	1 kegiatan	103.877.347	APBD		1 kegiatan	103.877.347
2	07	03	204	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kota Tangerang	100 perusahaan	103.877.347	APBD		100 perusahaan	103.877.347
2	07	03	205		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	1 kegiatan	246.961.300	APBD		1 kegiatan	246.961.300
2	07	03	205	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kota Tangerang	280 Dokumen	246.961.300	APBD		280 Dokumen	246.961.300
2	07	04			<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Prosentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan</b>		<b>98,84%</b>	<b>1.974.218.700</b>	APBD		<b>98,5%</b>	<b>10.972.000,00</b>
2	07	04	201		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	2 jenis	1.039.536.500,00	APBD		2 jenis	10.972.000,00
2	07	04	201	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kota Tangerang	6750 orang	337.657.700,00	APBD		6750 orang	337.657.700,00
2	07	04	201	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Tangerang	840 orang	701.878.800	APBD		840 orang	784.006.297,92
2	07	04	203		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Tangerang	12 Kegiatan	724.146.400	APBD		12 Kegiatan	724.146.400

**Rencana Kerja  
Disnaker Tahun 2024**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	04	203	03	Job Fair/ Bursa Kerja.	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Kota Tangerang	5000 orang	724.146.400	APBD		5000 orang	724.146.400
2	07	04	204		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	12 kegiatan	210.535.800	APBD		12 kegiatan	210.535.800
2	07	04	204	01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indomesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Kota Tangerang	170 orang	210.535.800	APBD		220 orang	210.535.800
2	07	05			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Prosentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan</b>		69,23%	1.084.906.056	APBD		68%	1.130.038.147,93
2	07	05	201		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	4 kegiatan	199.553.656	APBD		4 kegiatan	199.553.656
2	07	05	201	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kota Tangerang	130 perusahaan	111.803.656	APBD		130 perusahaan	111.803.656
2	07	05	201	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kota Tangerang	25 perusahaan	43.200.000	APBD		25 perusahaan	43.200.000
2	07	05	201	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kota Tangerang	9 Laporan	44.550.000	APBD		9 Laporan	44.550.000
2	07	05	202		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok	Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok	Kota Tangerang	5 kegiatan	885.352.400	APBD		5 kegiatan	930.484.492

**Rencana Kerja  
Disnaker Tahun 2024**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<b> KERJA dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b> KERJA dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota</b>							
2	07	05	202	01	<i>Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>95 perkara</i>	<i>297.128.400</i>	<i>APBD</i>		<i>95 perkara</i>	<i>342.260.492</i>
2	07	05	202	02	<i>Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>95 perkara</i>	<i>22.820.000</i>	<i>APBD</i>		<i>95 perkara</i>	<i>22.820.000</i>
2	07	05	202	03	<i>Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi</i>	<i>Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>12 Asosiasi dan Serikat Pekerja</i>	<i>41.892.000</i>	<i>APBD</i>		<i>12 Asosiasi dan Serikat Pekerja</i>	<i>41.892.000</i>
2	07	05	202	04	<i>Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>1 lembaga</i>	<i>434.532.000</i>	<i>APBD</i>		<i>1 lembaga</i>	<i>434.532.000</i>
2	07	05	202	05	<i>Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja</i>	<i>Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja</i>	<i>Kota Tangerang</i>	<i>60 orang</i>	<i>88.980.000</i>	<i>APBD</i>		<i>60 orang</i>	<i>88.980.000</i>

### **3.3 Program Dan Kegiatan**

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Disnaker sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Selain itu juga program berarti kumpulan kegiatan yang sistemis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun masyarakat tertentu untuk mencapai sasaran tertentu.

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan oleh Disnaker pada tahun 2024 sebanyak 5 (lima) program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
3. Program Penempatan Kerja;
4. Program Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas;
5. Program Hubungan Industrial.

Kegiatan adalah perwujudan dari program Disnaker sebagai bagian dari pencapaian program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan sebagai masukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku (fleksibel).

Berdasarkan program-program yang telah ditetapkan Disnaker, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Disnaker pada tahun 2024, yaitu:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota**, ada 6 (enam) kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :
  - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah;

- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 2. Program Perencanaan Tenaga Kerja.** Ada 1 (satu) kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu :
- a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
- 3. Program Penempatan Tenaga Kerja,** ada 3 (tiga) kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :
- a. Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
  - c. Pelindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Kabupaten/Kota.
- 4. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja,** ada 5 (lima) kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi;
  - b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
  - c. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
  - d. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil;
  - e. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 5. Program Hubungan Industrial,** ada 2 (dua) kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :
- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota

## **BAB IV**



## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan Renja berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan merupakan bagian yang utuh dari RPJMD Kota Tangerang dan Renstra Dinas Ketenagakerjaan. Dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Renja.

Program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Ketenagakerjaan pada tahun 2024 diperlihatkan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Tolok Ukur	Target	
					DINAS KETENAGAKERJAAN	26.900.081.057,00					263.576.977.045,79
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	26.900.081.057,00					263.576.977.045,79
2	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	26.900.081.057,00					263.576.977.045,79
2	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.499.562.204,00					20.499.562.204,00
2	0	0	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000,00					500.000,00
2	0	0	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
						500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	500.000,00
2	0	0	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.019.737.323,00					14.019.737.323,00
2	0	0	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
						14.019.737.323,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	14.019.737.323,00
2	0	0	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	500.000,00					500.000,00

Rancangan  
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Tolok Ukur	Target	
2	0	0	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
						500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	500.000,00
2	0	0	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000,00					12.000.000,00
2	0	0	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
						12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	12.000.000,00
2	0	0	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.857.524.750,00					1.857.524.750,00
2	0	0	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						13.523.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.523.000,00
2	0	0	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						148.970.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	148.970.100,00

Rancangan  
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Tolok Ukur	Target	
2	0	0	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
	7	1				40.853.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	40.853.600,00
2	0	0	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
	7	1				943.984.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	943.984.000,00
2	0	0	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
	7	1				33.175.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	33.175.000,00
2	0	0	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
	7	1				1.821.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.821.600,00
2	0	0	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
	7	1				675.197.450,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 Laporan	675.197.450,00

Rancangan  
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Tolok Ukur	Target		
									dan Konsultasi SKPD			
2	0	0	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.166.600,00						20.166.600,00
2	0	0	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						20.166.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		20.166.600,00
2	0	0	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.874.847.681,00						3.874.847.681,00
2	0	0	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						5.493.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		5.493.400,00
2	0	0	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						863.372.080,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		863.372.080,00
2	0	0	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						3.005.982.201,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3.005.982.201,00

Rancangan  
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Tolok Ukur	Target	
2	0	0	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	714.285.850,00					714.285.850,00
2	0	0	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						264.806.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	264.806.000,00
2	0	0	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						239.687.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	239.687.100,00
2	0	0	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						51.027.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	71 Unit	51.027.500,00

Rancangan  
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Tolok Ukur	Target	
2	0	0	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						158.765.250,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	158.765.250,00
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>150.428.460,00</b>					<b>156.686.283,94</b>
2	0	0	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	150.428.460,00					156.686.283,94
2	0	0	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro						
						98.343.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	98.343.000,00
2	0	0	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro						
						52.085.460,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	30 Orang	58.343.283,94
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>3.190.965.637,00</b>					<b>239.767.786.612,00</b>
2	0	0	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.683.704.837,00					239.260.525.812,00
2	0	0	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						

Rancangan  
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Tolok Ukur	Target	
						2.255.579.837,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	380 Orang	238.832.400.812,00
2	0	0	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja						
						28.125.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	30 Lembaga	28.125.000,00
2	0	0	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota						
						400.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	32 Unit	400.000.000,00
2	0	0	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	263.172.400,00					263.172.400,00



Rancangan  
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Tolok Ukur	Target	
2	0	0	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						
						263.172.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	25 Lembaga	263.172.400,00
2	0	0	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	13.327.100,00					13.327.100,00
2	0	0	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi						
						13.327.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 Perizinan	13.327.100,00
2	0	0	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	29.240.900,00					29.240.900,00
2	0	0	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil						
						29.240.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	30 Perusahaan	29.240.900,00
2	0	0	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	201.520.400,00					201.520.400,00
2	0	0	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja						

Rancangan  
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Tolok Ukur	Target	
						201.520.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	201.520.400,00
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>1.974.218.700,00</b>					<b>2.022.903.797,92</b>
2	0	0	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1.213.294.100,00					1.261.979.197,92
2	0	0	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						
						304.215.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	6750 Orang	304.215.300,00
2	0	0	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja						
						909.078.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	840 Orang	957.763.897,92
2	0	0	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	550.388.800,00					550.388.800,00
2	0	0	2.03	0003	Job Fair / Bursa Kerja						

Rancangan  
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Tolok Ukur	Target	
						550.388.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	5000 Orang	550.388.800,00
2	0	0	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	210.535.800,00					210.535.800,00
2	0	0	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)						
						210.535.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	150 Orang	210.535.800,00
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>1.084.906.056,00</b>					<b>1.130.038.147,93</b>
2	0	0	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	199.553.656,00					199.553.656,00
2	0	0	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan						

Rancangan  
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Tolok Ukur	Target	
						111.803.656,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	130 Perusahaan	111.803.656,00
2	0	0	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan						
						43.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	25 Perusahaan	43.200.000,00
2	0	0	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						
						44.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	9 Laporan	44.550.000,00

Rancangan  
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Tolok Ukur	Target	
2	0	0	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	885.352.400,00					930.484.491,93
2	0	0	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
						297.128.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	95 Perkara	342.260.491,93
2	0	0	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
						22.820.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	95 Perkara	22.820.000,00
2	0	0	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi						
						41.892.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	41.892.000,00
2	0	0	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota						

Rancangan  
Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Tolok Ukur	Target	
						434.532.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	434.532.000,00
2	0	0	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						
						88.980.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	60 Orang	88.980.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>26.900.081.057,00</b>					<b>263.576.977.045,79</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Disnaker Kota Tangerang merupakan acuan bagi seluruh unit kerja/bidang yang ada di lingkungan Disnaker dalam pelaksanaan kegiatan 1 (satu) tahunan dan diharapkan Renja Disnaker mampu menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 terlaksana dengan baik.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Renja Disnaker Kota Tangerang Tahun 2024 memuat kebijakan serta rencana program/kegiatan Disnaker Tahun 2024 yang merupakan turunan dari arah kebijakan Kota Tangerang di tahun 2024 agar pelaksanaan program dan kegiatan Disnaker sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah di Tahun 2024;
2. Renja Disnaker Kota Tangerang Tahun 2024 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Disnaker, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Disnaker;
3. Renja Disnaker Kota Tangerang Tahun 2024 dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2024;
4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kota Tangerang, keberadaan Renja Disnaker harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Disnaker (RKA-Disnaker).